

# Koordinasi Camat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

**BRYAN F. RATELA**

**SONNY . P. I. ROMPAS**

**JOORIE M RURU**

## ABSTRACT

District head as leaders of districts is one of the principals in the district PNPM that as Trustees implementation to villages in the districts. Therefore the Head role in coordinating the implementation of PNPM Mandiri districts. The purpose of this study was to determine how the district head coordination in the implementation of PNPM Rural in the district Pasan Southeast Minahasa Regency. This study used qualitative methods. The focus of research is camat coordination in planning activities and in the implementation of activities funded by PNPM Mandiri. Data sources / informants drawn from elements PNPM actors at the district level and village level, as many as 15 people. Collecting data using interview techniques. While the analysis of data using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman.

The results showed: (1) Coordination Head PNPM Mandiri in planning activities carried out effectively through inter-village meetings (MAD) Dissemination and Proposed Priority MAD discuss and rank the proposed activities, and through MAD Determination Proposal for decision making. With the coordination of the planning of these activities so that the activities set out in the villages can fit the needs of local communities; (2) Coordination Head in the implementation of PNPM Mandiri activities carried out effectively through Early in the District Coordination Meeting, Meeting Evaluation, Monitoring and Auditing, and Reporting. With District head coordination in the implementation of activities dilaksanakan pada activities so that villages can run orderly, smoothly and successfully.

The research results provide the conclusion that the sub-district coordination in the implementation of PNPM Rural in the district Pasan Southeast Minahasa Regency implemented effectively.

Based on the results of this penellian it can be recommended some suggestions: (1) Coordination Head PNPM Mandiri in planning activities need to be improved. In this case the sub-district must provide guidance and direction effectively against all perpetrators of PNPM Mandiri in the district and in the village; (2) Coordination Head in the implementation of PNPM Mandiri still needs to be improved. In this case the sub-district should be more frequent visits to villages to monitor, inspect and supervise the implementation of PNPM Mandiri.

**Keywords:** District head coordination, implementation of PNPM Mandiri

## **PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya menjadi fenomena yang terus aktual tetapi menjadi masalah yang belum pernah terpecahkan secara tuntas. Kenyataan

tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya terobosan penanggulangan kemiskinan dengan mencanangkan dan melaksanakan berbagai paket program. Salah satu program

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 hingga sekarang ini ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri ini merupakan pengganti atau kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai tahun 2006.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi program ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Tujuan umum program ini ialah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah : (1) meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pembangunan; (2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumberdaya lokal; (3) mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (4) mengembangkan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) melembagakan pengelolaan dana bergulir; dan (6) mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan yang dibiayai melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat miskin; (2) kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal; (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal; dan (4) penambahan permodalan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Kecamatan Pasan merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara penerima PNPM-Mandiri. Sejak Kecamatan Pasan diresmikan pada tahun 2010 (hasil pemekaran dari kecamatan Ratahan)

sampai dengan tahun 2014 mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri. Dana PNPM-Mandiri tersebut dialokasikan kepada semua desa yang ada di wilayah kecamatan Pasan, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan beberapa sarana/prasarana dasar khususnya ekonomi, dan untuk modal kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

Semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa tersebut perlu dikoordinasikan dengan efektif oleh Camat selaku pembina pelaksanaan PNPM Mandiri kepada desa-desa di wilayah kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi serta keterpaduan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana PNPM Mandiri pada setiap desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Dalam hal ini koordinasi camat dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan baik dalam tahap perencanaan kegiatan maupun dalam tahap pelaksanaan kegiatan.

Atas pertimbangan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis dalam rangka penyusunan skripsi tertarik untuk mengangkat tema/judul penelitian “Koordinasi Camat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Yang Digunakan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Menurut Arikunto (2002), penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep-konsep, menghimpun fakta, mengklasifikasi data, menganalisis dan menafsirkan data, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual**

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka yang

merupakan fokus penelitian ini ialah “koordinasi Camat dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan”. Fokus penelitian tersebut didefinisikan secara konseptual sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Camat untuk menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa-desa di wilayah kecamatan. Koordinasi Camat terhadap implementasi PNPM Mandiri tersebut meliputi koordinasi dalam perencanaan kegiatan dan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa.

### C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah tersedia di kantor Camat, kantor Kepala Desa, dan pada Penanggung Jawab Pelaksana

Kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kuantitatif ataupun kualitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

### D. Informan Penelitian

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “purposive sampling” yaitu penentuan informan/sumber data secara sengaja atau berdasarkan tujuan tertentu (Nugroho, 2009).

Adapun informan dalam penelitian ini diambil dari para pelaku PNPM Mandiri di tingkat Kecamatan dan di tingkat Desa, yaitu sebagai berikut :

- (1) Informan dari pelaku PNPM Mandiri di Kecamatan sebanyak 5 orang terdiri dari : Camat sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri kepada desa-desa di wilayah kecamatan; Kepala Seksi PMD Kecamatan selaku Penanggung Jawab Operasional

Kegiatan (PjOK); Unit Pengelola Kegiatan (UPK); Fasilitator Kecamatan; dan Pendamping Lokal.

- (2) Informan dari pelaku PNPM Mandiri di Desa sebanyak 10 orang yaitu : Kepala Desa selaku pembina/pengendali pelaksanaan di desa (2 orang), Badan Permusyawaratan Desa atau BPD selaku pengawas pelaksanaan di desa (2 orang), Tim Pengelola Kegiatan atau TPK (2 orang), Kelompok Masyarakat atau POKMAS Kegiatan PNPM Mandiri (2 orang), dan Tokoh/Pemuka Masyarakat (2 orang).

#### **E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006; Bungin, 2010). Adapun metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview). Metode/teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
2. Pengamatan (Observasi). Metode/teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian baik pada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun pada tim pelaksana kegiatan PNPM Mandiri di kecamatan dan tim pengelola kegiatan PNPM Mandiri di desa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan

menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Pasan**

#### **1. Letak, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk**

Kecamatan Pasan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Pasan terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kecamatan Pasan mempunyai luas wilayah sebesar 44,21 KM<sup>2</sup> yang terbagi pada 11 Desa yang ada di kecamatan ini. Jumlah penduduk kecamatan Pasan hingga akhir tahun 2013 yaitu sebanyak 7413 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

sebanyak 3763 jiwa atau 50,76% dan perempuan sebanyak 3650 jiwa atau 49,24%. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2037 KK.

Penduduk kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagian besar bekerja disektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, namun ada juga yang bekerja di sektor peternakan, perikanan, pertambangan, jasa perdagangan, PNS, dan lainnya.

sebanyak 5583 orang penduduk kecamatan Pasan yang bekerja, ada sebanyak 2326 orang atau 41,66% bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, kemudian sebanyak 1551 orang atau 27,78% bekerja di sector pertanian tanaman perkebunan/perladangan, sebanyak 1094 orang atau 19,60% di sector peternakan, sebanyak 107 orang 1,92% di sector perikanan, sebanyak 20 orang atau 0,36% di sector pertambangan, sebanyak 58 orang atau 1,54% di sector industri kecil/kerajinan, sebanyak 129 orang atau 2,31% di sector jasa perdagangan, sebanyak 166 atau 2,97% sebagai PNS, sebanyak 70 orang atau 1,29% sebagai karyawan swasta, dan 62 orang atau 1,11% sebagai pwnsiunan PNS/TNI/POILRI. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa

Tenggara menggantungkan hidup mereka pada usaha di sektor pertanian.

## **2. Keadaan Sosial Budaya**

### **a. Pendidikan**

Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah adalah apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dan berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah terus berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

### **3. Potensi Pertanian**

Potensi pertanian di wilayah kecamatan Pasan adalah pertanian tanaman pangan terutama padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah dan kacang hijau, keledai, dan ubi kayu dan ubi jalar ubi jalar.

## **4. Jumlah Aparatur Pemerintah Kecamatan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa hanya akan berjalan lancar, efisien dan efektif jika didukung dengan tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai.

Berdasarkan data Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasan Tahun 2014, jumlah aparat kecamatan Pasan adalah sebanyak 22 orang PNS yaitu di Kantor Camat sebanyak 13 orang dan di Desa (Sekdes PNS) 9 orang.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Deskripsi Hasil Wawancara**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Camat dalam implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan, yang secara konseptual didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Camat untuk menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa-desa di wilayah kecamatan. Koordinasi Camat terhadap implementasi PNPM Mandiri tersebut meliputi koordinasi dalam perencanaan kegiatan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana PNPM Mandiri pada desa-desa.

### **2. Rangkuman Hasil Wawancara**

Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa koordinasi camat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi koordinasi dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana PNPM Mandiri dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan tersebut.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah

mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sesuai dengan arahan PP No. 19 Tahun 2008, bahwa tugas Camat dalam mengkoordinasikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dan melakukan

evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Camat sebagai pemimpin atau kepala kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan, untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek yang harus dikoordinasikan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan adalah implementasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan di atas menemukan bahwa koordinasi Camat terhadap implementasi PNPM Mandiri dilaksanakan dengan efektif di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara baik dalam tahap perencanaan kegiatan maupun tahap pelaksanaan kegiatan. Koordinasi Camat dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai dana PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan efektif yaitu melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, Musyawarah



Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan di tingkat kecamatan. sehingga menghasilkan rencana usulan kegiatan yang tepat. Camat di dalam MAD Sosialisasi memberikan penjelasan serta pembinaan dan pengarahan kepada semua pelaku PNPM Mandiri tingkat kecamatan dan tingkat desa tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada MAD Prioritas Usulan dan MAD Penetapan Usulan Camat juga mengkoordinasikan semua pelaku PNPM Mandiri didalam membahas dan menyusun prioritas usulan kegiatan agar sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan, Camat mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan implementasi PNPM Mandiri yang ada di wilayah kerja kecamatan.

Dalam penelitian ini koordinasi Camat dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi baik dalam perencanaan kegiatan maupun

dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan :

1. Koordinasi Camat dalam perencanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan dengan efektif melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan yang membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan, dan melalui MAD Penetapan Usulan di tingkat kecamatan yang merupakan musyawarah untuk pengambilan keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan koordinasi yang efektif dalam perencanaan kegiatan tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang didanai melalui PNPM Mandiri yang ditetapkan pada setiap desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat terutama masyarakat miskin.
2. Koordinasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan dengan efektif melalui Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan, Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa, Rapat Evaluasi tingkat Kecamatan, Pemantauan dan Pengawasan/Pemeriksaan, dan Pelaporan. Dengan koordinasi camat yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga kegiatan

yang didanai PNPM Mandiri pada setiap desa dapat berjalan tertib, lancar, dan berhasil.

Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa koordinasi Camat dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan efektif.

## **B. Saran**

Bertolak dari hasil penellian ini maka dapatlah direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Koordinasi Camat dalam perencanaan kegiatan PNPM Mandiri masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini Camat harus memberikan pembinaan secara efektif terhadap semua pelaku PNPM Mandiri di kecamatan dan di desa dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan didanai dengan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Koordinasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri masih perlu di tingkatkan. Dalam hal ini Camat harus lebih sering melakukan kunjungan ke desa-desa untuk memantau, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.

## **Daftar pustaka**

- Arikunto,S. 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M. 2010, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, L.J.2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho. R, 2009, Public Policy, Jakarta Elex Media Komputindo.